

**SEKRETARIAT KOMISI
INFORMASI PUSAT**

LAPORAN KEUANGAN

Untuk Periode yang Berakhir Tanggal
31 Desember 2020

AUDITED

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Kantor Sekretariat Komisi Informasi Pusat adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Sekretaris Jenderal Kementerian Kominfo yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Kantor Sekretariat Komisi Informasi Pusat mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Sekretariat Komisi Informasi Pusat. Di samping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Jakarta, Februari 2021
Sekretaris Komisi Informasi Pusat,

ttd

Munzaer

NIP 196204031990031003

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Pernyataan Tanggung Jawab	iii
Ringkasan	1
I. Laporan Realisasi Anggaran	3
II. Neraca	4
III. Laporan Operasional	5
IV. Laporan Perubahan Ekuitas	6
V. Catatan atas Laporan Keuangan	7
A. Penjelasan Umum	7
B. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran	19
C. Penjelasan atas Pos-Pos Neraca	24
D. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Operasional	32
E. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas	38
F. Pengungkapan Penting Lainnya	43
VI. Lampiran dan Daftar	

SEKRETARIAT KOMISI INFORMASI PUSAT
WISMA BSG LT. 9
JL. ABDUL MUIS NO. 40 JAKARTA PUSAT
TELEPON 021 34830741, FAXIMILE 021 34531734

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Kantor Sekretariat Komisi Informasi Pusat yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2020 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Jakarta, Februari 2021
Sekretaris Komisi Informasi Pusat,

ttd

Munzaer

NIP 196204031990031003

Laporan Keuangan Kantor Sekretariat Komisi Informasi Pusat Tahun 2020 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2020.

Realisasi Pendapatan Negara pada TA 2020 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp7.390.506,00 atau mencapai 0,0 persen dari estimasi Pendapatan-LRA sebesar Rp 0.

Realisasi Belanja Negara pada TA 2020 adalah sebesar Rp19.493.042.303,00 atau mencapai 95 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp20.454.672.000,00

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 31 Desember 2020. Nilai Aset per 31 Desember 2020 dicatat dan disajikan sebesar Rp929.595.424,00 yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp235.695.666,- Aset Tetap (neto) sebesar Rp687.962.258,00 dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp5.937.500,00

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp20.676.269,00 dan Rp908.919.155,00

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan nonoperasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp156.840,00, sedangkan jumlah beban dari kegiatan operasional adalah sebesar

Rp18.950.456.394,00 sehingga terdapat Defisit dari Kegiatan Operasional senilai Rp18.950.299.554,-. Surplus Kegiatan Non Operasional dan Defisit Pos-pos Luar Biasa masing-masing sebesar Rp6.122.698,00 dan sebesar Rp 0 sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar Rp18.944.176.856,00.

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 01 Januari 2020 adalah sebesar Rp367.444.214,00, dikurangi Defisit-LO sebesar Rp18.944.176.856,00 ditambah Transaksi Antar Entitas sebesar Rp19.485.651.797,00 sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2020 adalah senilai Rp908.919.155,00.

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Tahun 2020 disusun dan disajikan dengan basis akrual.

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

SEKRETARIAT KOMISI INFORMASI PUSAT LAPORAN REALISASI ANGGARAN UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2020 DAN 2019

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	TA 2020		% thd Angg
		ANGGARAN	REALISASI	
PENDAPATAN	B			
Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1	-	7.390.506	#DIV/0!
JUMLAH PENDAPATAN		-	7.390.506	#DIV/0!
BELANJA	B.2			
Belanja Pegawai	B.3	6.160.323.000	5.306.988.018	86,15
Belanja Barang	B.4	13.844.349.000	13.736.994.285	99,22
Belanja Modal	B.5	450.000.000	449.060.000	99,79
Belanja Bantuan Sosial		-	-	#DIV/0!
JUMLAH BELANJA		20.454.672.000	19.493.042.303	95,30

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

II. NERACA

SEKRETARIAT KOMISI INFORMASI PUSAT NERACA PER 31 DESEMBER 2020 DAN 2019

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	2020	2019
ASET			
ASET LANCAR			
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1	-	-
Kas Lainnya dan Setara Kas		-	-
Piutang Bukan Pajak		-	-
Bagian Lancar TP/TGR		-	-
Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran		-	-
Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Lancar		-	-
Belanja Dibayar di Muka	C.2	2.281.166	1.377.418
Pendapatan yang Masih harus Diterima		-	-
Persediaan	C.3	233.414.500	152.878.156
Jumlah Aset Lancar		235.695.666	154.255.574
PIUTANG JANGKA PANJANG			
Tagihan TP/TGR		-	-
Tagihan Penjualan Angsuran		-	-
Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Jangka Panjang		-	-
Jumlah Piutang Jangka Panjang		-	-
ASET TETAP			
Tanah		-	-
Peralatan dan Mesin	C.4	4.035.338.216	3.669.720.716
Gedung dan Bangunan		-	-
Jalan, Irigasi, dan Jaringan		-	-
Aset Tetap Lainnya	C.5	49.473.000	49.473.000
Konstruksi dalam pengerjaan		-	-
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.6	(3.396.848.958)	(3.182.861.739)
Jumlah Aset Tetap		687.962.258	536.331.977
ASET LAINNYA			
Aset Tidak Berwujud	C.7	266.949.999	232.149.999
Aset Lain-Lain	C.8	83.442.500	-
Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya	C.9	(344.454.999)	(194.006.249)
Jumlah Aset Lainnya		5.937.500	38.143.750
JUMLAH ASET		929.595.424	728.731.301
KEWAJIBAN			
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK			
Uang Muka dari KPPN		-	-
Utang kepada Pihak Ketiga	C.10	20.676.269	340.955.837
Pendapatan Diterima di Muka		-	-
Beban yang Masih Harus Dibayar		-	-
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		20.676.269	340.955.837
JUMLAH KEWAJIBAN		20.676.269	340.955.837
EKUITAS			
Ekuitas	C.11	908.919.155	367.444.214
JUMLAH EKUITAS		908.919.155	367.444.214
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		929.595.424	708.400.051

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

III. LAPORAN OPERASIONAL

SEKRETARIAT KOMISI INFORMASI PUSAT LAPORAN OPERASIONAL UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2020 DAN 2019

(Dalam Rupiah)

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

URAIAN	CATATAN	2020	2019
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN			
Penerimaan Negara Bukan Pajak	D.1	156.840	-
JUMLAH PENDAPATAN		156.840	-
BEBAN			
Beban Pegawai	D.2	4.982.415.537	5.016.246.620
Beban Persediaan	D.3	262.601.506	409.649.384
Beban Barang dan Jasa	D.4	10.654.049.256	10.856.526.157
Beban Pemeliharaan	D.5	267.189.716	325.699.437
Beban Perjalanan Dinas	D.6	2.474.895.660	4.987.562.210
Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat		-	-
Beban Bantuan Sosial		-	-
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.7	309.304.719	330.013.961
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih		-	-
JUMLAH BEBAN		18.950.456.394	21.925.697.769
SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL		(18.950.299.554)	(21.925.697.769)
KEGIATAN NON OPERASIONAL			
Surplus Penjualan Aset Nonlancar	D.8	-	3.000.000
Defisit Penjualan Aset Non Lancar		-	-
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		(247.400)	(626.729)
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		6.370.098	6.241.830
SURPLUS /DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL		6.122.698	8.615.101
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA		(18.944.176.856)	(21.917.082.668)
POS LUAR BIASA			
Pendapatan PNB	D.9	-	-
Beban Perjalanan Dinas		-	-
Beban Persediaan		-	-
SURPLUS/DEFISIT LO		(18.944.176.856)	(21.917.082.668)

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

SEKRETARIAT KOMISI INFORMASI PUSAT LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2020 DAN 2019

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	2020	2019
EKUITAS AWAL	E.1	367.444.214	674.096.789
SURPLUS/DEFISIT LO	E.2	(18.944.176.856)	(21.917.082.668)
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	E.3	-	-
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR		-	-
PENYESUAIAN NILAI ASET	E.3.1	-	-
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	E.3.2	-	-
SELISIH REVALUASI ASET TETAP	E.3.3	-	-
KOREKSI NILAI ASET TETAP NON REVALUASI	E.3.4	-	-
KOREKSI LAIN-LAIN	E.3.5	-	-
JUMLAH		(18.576.732.642)	(21.242.985.879)
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.4	19.485.651.797	21.610.430.093
EKUITAS AKHIR	E.5	908.919.155	367.444.214

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

A. PENJELASAN UMUM

A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Sekretariat Komisi Informasi Pusat

Dasar Hukum Entitas dan Rencana Strategis Kantor Sekretariat Komisi Informasi Pusat didirikan sebagai salah satu upaya pemerintah untuk menjamin keterbukaan informasi publik di badan publik tingkat pusat. Organisasi dan tata kerja entitas diatur oleh Undang undang nomor 14 tahun 2008 dan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 11/PER/M.KOMINFO/037/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Informasi Pusat. Entitas berkedudukan di Wisma BSG Lantai 9 Jalan Abdul Muis No. 40 Jakarta Pusat.

Kantor Sekretariat Komisi Informasi Pusat mempunyai tugas dan fungsi dalam Memutuskan sengketa informasi publik serta memberikan edukasi dan sosialisasi pada masyarakat dan Kementerian Negara/Lembaga. Melalui peran tersebut diharapkan Kementerian dan Lembaga yang berstatus Badan Publik dapat membuka informasi publiknya kepada Masyarakat yang membutuhkan informasi tersebut guna mendukung pemerintahan yang bersih transparan dan akuntabel.

Untuk mewujudkan tujuan di atas Sekretariat Komisi Informasi Pusat berkomitmen dengan visi “**mewujudkan Keterbukaan informasi publik di badan publik, agar tercapai pemerintahan yang bersih, transparan dan akuntabel.**” Untuk mewujudkannya akan dilakukan beberapa langkah-langkah strategis sebagai berikut:

- Menyelenggarakan Bimtek Keterbukaan Informasi Publik dalam rangka sosialisasi dan edukasi kepada

masyarakat dan Kementerian Negara/Lembaga yang berkelanjutan.

- Membina secara efektif Kementerian Negara/Lembaga pembentukan Pejabat Pengelola Dokumentasi dan Informasi (PPID).
- Mengembangkan sistem yang profesional dan terpercaya.

*Pendekatan
Penyusunan
Laporan
Keuangan*

A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Tahun 2020 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Sekretariat Komisi Informasi Pusat. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

A.3. Basis Akuntansi

*Basis
Akuntansi*

Sekretariat Komisi Informasi Pusat menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

*Dasar
Pengukuran*

A.4. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Sekretariat Komisi Informasi Pusat dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing ditranslasi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

*Kebijakan
Akuntansi*

A.5. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2020 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Biro Keuangan Sekretariat Jenderal Kominfo yang merupakan entitas pelaporan dari Sekretariat Komisi Informasi Pusat. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Sekretariat Komisi Informasi Pusat adalah sebagai berikut:

*Pendapatan-
LRA*

(1) Pendapatan- LRA

- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi

sumber pendapatan.

*Pendapatan-
LO*

(2) Pendapatan- LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan adalah sebagai berikut:
 - Pendapatan Jasa Pelatihan diakui setelah pelatihan selesai dilaksanakan
 - Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional antara nilai dan periode waktu sewa.
 - Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettanya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Belanja

(3) Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh

pembayarannya kembali oleh pemerintah.

- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Beban

(4) Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Aset

(5) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

Aset Lancar

a. Aset Lancar

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai

nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.

- Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal
- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan	100%
	2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbedaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
 - harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
 - harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

Aset Tetap

b. Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk

kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.

- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
 - a) Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah);
 - b) Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah);
 - c) Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.
- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang

pengelolaan BMN/BMD.

*Penyusutan
Aset Tetap*

c. Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah
 - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

*Piutang
Jangka
Panjang*

d. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

*Aset
Lainnya*

e. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas

dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.

- Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat (tahun)
<i>Software</i> Komputer	4
<i>Franchise</i>	5
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim.	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram.	50
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.I	70

- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

Kewajiban

(6) Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

Ekuitas

(7) Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset

dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Selama periode berjalan, Sekretariat Komisi Informasi Pusat melakukan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal sebanyak 4 kali. Revisi yang pertama di tingkat Direktorat Jenderal Anggaran karena Refokusing anggaran terkait dengan penanganan COVID-19. Pagu anggaran yang awalnya Rp25,600,107,000,- turun menjadi Rp20,033,652,000,- adapun anggaran yang dipotong seluruhnya diambil dari belanja non operasional. Revisi kedua pada tingkat Kanwil terkait dengan adanya perubahan pejabat perbendaharaan dalam hal ini KPA serta adanya penyesuaian pada halaman 3 DIPA. Revisi ketiga pada tingkat DJA dilakukan dalam hal pemenuhan kekurangan kenaikan tunjangan menjadi 80%. Terkait hal tersebut maka Komisi Informasi Pusat mendapatkan tambahan anggaran pada belanja pegawai (51) sebesar Rp421,020,000,-. Revisi keempat dilakukan pada tingkat Kanwil terkait dengan revisi halaman 3 DIPA. Perubahan tersebut berdasarkan sumber pendapatan dan jenis belanja adalah sebagai berikut:

Uraian	2020	
	ANGGARAN AWAL	ANGGARAN SETELAH REVISI
Pendapatan	-	-
Pendapatan Jasa	-	-
Pendapatan Lain-lain	-	-
Jumlah Pendapatan	-	-
Belanja		
Belanja Pegawai	5.739.303.000	6.160.323.000
Belanja Barang	19.410.804.000	13.844.349.000
Belanja Modal	450.000.000	450.000.000
Belanja Bantuan Sosial	0	-
Jumlah Belanja	25.600.107.000	20.454.672.000

*Realisasi
Pendapatan
Rp7.233.666,0
0*

B.1 Pendapatan

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp7.233.666,00 atau mencapai 0 persen karena tidak ada anggaran pendapatan. Pendapatan Kantor Sekretariat Komisi Informasi Pusat terdiri Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan, Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran yang Lalu dan Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu dengan rincian sebagai berikut:

Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan

Uraian	2020		
	Anggaran	Realisasi	% Real Angg.
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	-	156.840	-
Pendapatan dari Penjualan	-	-	-
Pendapatan Lain-lain	-	7.233.666	#DIV/0!
Jumlah	-	7.390.506	#DIV/0!

Realisasi Pendapatan TA 2020 mengalami kenaikan sebesar 83,22 persen dibandingkan TA 2019. Hal ini

disebabkan karena adanya Penerimaan kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu berupa potongan tunjangan kinerja dan uang makan pegawai yang tinggi pada TA 2020 dibandingkan TA 2019.

Perbandingan Realisasi Pendapatan TA 2020 dan 2019

URAIAN	REALISASI T.A. 2020	REALISASI T.A. 2019	NAIK (TURUN) %
Pendapatan dari Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	156.840	-	#DIV/0!
Pendapatan dari Penjualan	-	3.000.000	0,00
Pendapatan Lain-lain	7.233.666	1.033.780	599,73
Jumlah	7.390.506	4.033.780	83,22

Realisasi

Belanja Negara

Rp19.493.042.303,00

B.2 Belanja

Realisasi Belanja instansi pada TA 2020 adalah sebesar Rp19.493.042.303,- atau 95% dari anggaran belanja sebesar Rp20.454.672.000,00 Rincian anggaran dan realisasi belanja TA 2019 adalah sebagai berikut:

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja TA 2020

Uraian	2020		
	Anggaran	Realisasi	% Real Angg.
Belanja Pegawai	6.160.323.000	5.306.988.018	86,15
Belanja Barang	13.844.349.000	13.736.994.285	99,22
Belanja Modal	450.000.000	449.060.000	99,79
Belanja Bantuan Sosial	-	-	-
Total Belanja Kotor	20.454.672.000	19.493.042.303	95,30
Pengembalian	-	-	-
Jumlah	20.454.672.000	19.493.042.303	95,30

Dibandingkan dengan TA 2019, Realisasi Belanja TA 2020 mengalami Penurunan sebesar 9,81% dibandingkan realisasi belanja pada tahun sebelumnya. Hal ini terjadi karena terdapat pemotongan anggaran Komisi Informasi Pusat akibat dari *re-focussing* anggaran karena adanya pandemi COVID-19 serta pengalihan

penyelenggaraan kegiatan yang semula dianggarkan secara tatap muka namun pelaksanaannya dilakukan secara daring.

Perbandingan Realisasi Belanja TA 2020 dan 2019

URAIAN	REALISASI TA 2020	REALISASI TA 2019	NAIK (TURUN) %
Belanja Pegawai	5.306.988.018	4.709.040.091	12,70
Belanja Barang	13.736.994.285	16.584.774.282	(17,17)
Belanja Modal	449.060.000	320.649.500	40,05
Belanja Bantuan Sosial	-	-	-
Jumlah	19.493.042.303	21.614.463.873	(9,81)

*Belanja
Pegawai
Rp4.709.040.0
91,-*

B.3 Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai TA 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp5.306.988.018,00 dan Rp4.709.040.091,00. Belanja Pegawai adalah belanja atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Realisasi belanja TA 2020 mengalami kenaikan sebesar 12,70 persen. Hal ini disebabkan karena pada tahun 2020 jabatan kosong pada jabatan eselon II dan eselon III telah terpenuhi.

Perbandingan Belanja Pegawai TA 2020 dan 2019

URAIAN	REALISASI TA 2020	REALISASI TA 2019	NAIK (TURUN) %
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	1.314.693.658	1.174.308.134	11,95
Belanja Gaji dan Tunjangan Non PNS	0	0	-
Belanja Honorarium	2.295.777.935	2.486.600.000	(7,67)
Belanja Lembur	-	-	-
Belanja Tunj. Khusus & B Transito	1.696.516.736	1.049.428.560	61,66
Jumlah Belanja Kotor	5.306.988.329	4.710.336.694	12,67
Pengembalian Belanja Pegawai	311	(1.296.603)	(100,02)
Jumlah Belanja	5.306.988.018	4.709.040.091	12,70

*Belanja
Barang
Rp13.736.994.2
85,00*

B.4 Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang TA 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp13.736.994.285,00 dan Rp16.584.774.282,-. Realisasi Belanja Barang TA 2020 mengalami penurunan sebesar 17,17 persen dari Realisasi Belanja Barang TA 2019. Hal ini terjadi karena terdapat pemotongan anggaran Komisi Informasi Pusat akibat dari *re-focussing* anggaran karena adanya pandemi COVID-19 serta pengalihan penyelenggaraan kegiatan yang semula dianggarkan secara tatap muka namun pelaksanaannya dilakukan secara daring.

Perbandingan Belanja Barang TA 2019 dan 2018

URAIAN	REALISASI TA 2020	REALISASI TA 2019	NAIK (TURUN) %
Belanja Barang Operasional	3.775.317.399	3.503.608.964	7,76
Belanja Barang Non Operasional	937.398.665	1.498.941.698	(37,46)
Belanja Barang Operasional - COVID 19	205.473.986	0	
Belanja Jasa	5.752.465.248	5.853.975.495	(1,73)
Belanja Pemeliharaan	264.793.077	308.918.054	(14,28)
Belanja Barang Persediaan	343.736.000	434.179.000	-
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	2.479.734.217	4.789.026.068	(48,22)
Belanja Perjalanan Luar Negeri	-	205.399.365	(100,00)
Jumlah Belanja Kotor	13.758.918.592	16.594.048.644	-17,09%
Pengembalian Belanja	(21.924.307)	(9.274.362)	
Jumlah Belanja	13.736.994.285	16.584.774.282	-17,17%

B.5 Belanja Modal

*Belanja Modal
Rp449.060.000,
00*

Realisasi Belanja Modal TA 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp449.060.000,00 dan Rp320.649.500,-. Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

Realisasi Belanja Modal pada TA 2020 mengalami Kenaikan sebesar 78,36% dibandingkan TA 2019 hal ini terjadi karena adanya pembenahan perangkat penunjang kerja pegawai.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal TA 2020 dan 2019

URAIAN	REALISASI T.A. 2020	REALISASI T.A. 2019	NAIK (TURUN) %
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	449.060.000	285.849.500	57,10
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0	0	0,00
Belanja Modal Lainnya		34.800.000	0,00
Jumlah Belanja Kotor	449.060.000	320.649.500	40,05
Pengembalian	-	-	-
Jumlah Belanja	449.060.000	251.772.499	78,36

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

*Kas di
Bendahara
Pengeluaran
Rp 0*

C.1 Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp 0 dan Rp 0 yang merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan berada di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa UP/TUP yang belum dipertanggung-jawabkan atau belum disetorkan ke Rekening Kas Negara per tanggal neraca. Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran adalah sebagai berikut:

Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran TA 2020 dan 2019

Keterangan	TH 2019	TH 2017
Uang Tunai	-	-
Bank BRI No. Rekening 032901002931306	-	-
Jumlah	-	-

Belanja

Dibayar di

Muka

Rp2.281.166,00

C.2 Belanja Dibayar di Muka

Saldo Belanja Dibayar di Muka per tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing adalah sebesar Rp2.281.166,00 dan Rp1.377.418,00. Rincian Belanja Dibayar di Muka adalah sebagai berikut:

Rincian Belanja Dibayar di Muka TA 2020 dan 2019

Jenis	TH 2020	TH 2019
Pot.Kehadiran Tunkin bln Des 2020	1.021.166	921.668
Kelebihan Pembayaran Uang Makan Bln Des 2020	1.260.000	455.750
	-	-
Jumlah	2.281.166	1.377.418

Persediaan

Rp233.414.500,

00

C.3 Persediaan

Nilai Persediaan per 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing adalah sebesar Rp233.414.500,00 dan Rp152.878.156,00.

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Rincian Persediaan per 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

Rincian Persediaan TA 2020 dan 2019

Jenis	TH 2020	TH 2019
Barang Konsumsi	232.680.600	152.878.156
Barang untuk Pemeliharaan	733.900	-
Suku Cadang	-	-
Barang Persediaan untuk Diserahkan kepada Masyarakat	-	-
Persediaan Lainnya	-	-
Jumlah	233.414.500	152.878.156

Semua jenis persediaan pada tanggal pelaporan berada dalam kondisi baik.

Peralatan dan Mesin

Rp4.035.338.216,00

C.4 Peralatan dan Mesin

Saldo aset tetap berupa Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2020 dan 2019 adalah Rp4.035.338.216,00 dan Rp3.669.720.716,-. Mutasi nilai Peralatan dan Mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2019	3.669.720.716
Mutasi tambah:	
Penggunaan kembali	0
Pembelian	449.060.000
Hibah Barang	0
Transfer Masuk	0
Koreksi tambah	0
Mutasi kurang:	0
Penghentian dari penggunaan	83.442.500
Saldo per 31 Desember 2020	4.035.338.216
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2020	-3.396.848.958
Nilai Buku per 31 Desember 2020	638.489.258

Mutasi transaksi penambahan peralatan dan mesin
berupa:

- a. Pembelian 1 buah Alat Penggiling Kopi senilai Rp23.000.000,00
- b. Pembelian 1 buah Lemari Besi/ Metal senilai Rp2.450.000,00
- c. Pembelian 2 buah Filing Cabinet Besi senilai Rp3.900.000,00
- d. Pembelian 1 buah Lemari Display senilai Rp8.850.000,00
- e. Pembelian 1 buah LCD Projector/Infocus senilai Rp25.000.000,00
- f. Pembelian 4 buah Meja Kerja Kayu senilai Rp21.570.000,00
- g. Pembelian 250 buah kursi besi/metal senilai Rp12.100.000,00
- h. Pembelian 1 set Backdrop TV/Wardrobe senilai Rp44.400.000,00
- i. Pembelian 1 buah Camera Video senilai Rp23.265.000,00
- j. Pembelian 2 buah Dispenser senilai Rp10.500.000,00
- k. Pembelian 1 buah Lensa Kamera senilai Rp5.885.000,00
- l. Pembelian 1 Lampu Blitz Kamera senilai Rp5.720.000,00
- m. Pembelian 4 buah LCD Monitor senilai Rp2.250.000,00
- n. Pembelian 1 buah Clip On senilai Rp13.860.000,00
- o. Pembelian 1 buah Refrigerator/Freezer senilai Rp4.250.000,00
- p. Pembelian 3 buah PC Unit senilai Rp38.299.000,00

q. Pembelian 17 buah Note Book senilai Rp168.066.700,00

r. Pembelian 6 buah Printer (Peralatan Personal Komputer) senilai Rp12.594.300,00

s. Pembelian 3 buah Scanner (Peralatan Personal Komputer) senilai Rp23.100.000,00

Mutasi pengurangan peralatan dan mesin berupa;

a. Penghentian penggunaan 1 unit Sepeda Motor senilai Rp83.442.500,00.

Rincian aset tetap Peralatan dan Mesin disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

*Aset Tetap
Lainnya
Rp49.473.000*

C.5 Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2020 dan 2019 adalah Rp49.473.000 dan Rp49.473.000,-. Tidak terdapat penambahan atau pengurangan Aset Tetap Lainnya. Mutasi nilai Aset Tetap Lainnya tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2019	49.473.000
Mutasi tambah:	
-	0
Mutasi kurang:	
-	0
Saldo per 31 Desember 2020	49.473.000
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2020	0
Nilai Buku per 31 Desember 2020	49.473.000

Rincian Aset Tetap Lainnya disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

*Akumulasi
Penyusutan
Aset Tetap
Rp3.396.848.958,
00*

C.6 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2020 dan 2019 adalah masing-masing Rp3.396.848.958,00 dan Rp3.182.861.739,-. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang disusutkan selama masa manfaat aset yang bersangkutan selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP). Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

*Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap
TA 2020*

No	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1	Peralatan dan Mesin	4.035.338.216	3.396.848.958	638.489.258
2	Gedung dan Bangunan	0	0	0
3	Jalan, Irigasi dan Jaringan	0	0	0
4	Aset Tetap Lainnya	49.473.000	0	49.473.000
Akumulasi Penyusutan		4.084.811.216	3.396.848.958	687.962.258

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

*Aset Tak
Berwujud
Rp266.949.999
9,-*

C.7 Aset Tak Berwujud

Saldo Aset Tak Berwujud (ATB) per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah Rp266.949.999,00 dan Rp266.949.999,00.

Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi tidak mempunyai wujud fisik. Aset Tak Berwujud pada Satker Sekretariat Komisi Informasi Pusat berupa *software* yang digunakan untuk menunjang operasional kantor. Mutasi transaksi terhadap

Aset Tak Berwujud pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2019	266.949.999
Mutasi tambah:	-
Pembelian	-
Mutasi kurang:	-
Saldo per 31 Desember 2020	266.949.999
Akumulasi Amortisasi s.d. 31 Desember 2020	(261.012.499)
Nilai Buku per 31 Desember 2019	5.937.500

Rincian Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

Rincian Aset Tak berwujud TA 2020

Uraian	Nilai Perolehan
Software Komputer	266.949.999
	0
Jumlah	266.949.999

Aset Lain-Lain
Rp0

C.8 Aset Lain-Lain

Saldo Aset Lain-lain per 31 Desember 2020 dan 2019 adalah Rp0 dan Rp0. Aset Lain-lain merupakan Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional entitas. Adapun mutasi aset lain-lain adalah sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2019	-
Mutasi tambah:	
- Penghentian penggunaan	-
- Peralatan dan Mesin Dalam Renovasi	-
- Aset Tetap Lainnya Dalam Renovasi	-
Mutasi kurang:	
- penghapusan BMN	-
Saldo per 31 Desember 2020	-

Tidak ada transaksi penambahan dan pengurangan aset lain-lain. Rincian Aset Lain-lain berdasarkan nilai

perolehan, akumulasi penyusutan dan nilai buku tersaji pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya Rp344.454.999,00

C.9 Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 31 Desember 2020 dan 2019 adalah masing-masing Rp344.454.999,00 dan Rp234.137.499,-. Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya merupakan kontra akun Aset Lainnya yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Lainnya. Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

Rincian Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan/ Amortisasi	Nilai Buku
Aset Tak Berwujud	0	0	0
Software	266.949.999	-261.012.499	527.962.498
Jumlah	266.949.999		527.962.498
Aset Lain-lain	83.442.500	-83.442.500	166.885.000
Jumlah	350.392.499	-344.454.999	694.847.498

Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.

Utang kepada Pihak Ketiga

C.10 Utang kepada Pihak Ketiga

Rp20.676.269,00, Nilai Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing sebesar Rp20.676.269,00 dan Rp340.955.837,-. Adapun rincian Utang Pihak Ketiga pada Kantor Sekretariat Komisi Informasi Pusat adalah tagihan kartu kredit pemerintah atas pemakaian BBM di Desember 2020 yang dibayarkan pada Januari 2021, dimana rinciannya adalah sebagai berikut:

Rincian Utang kepada Pihak Ketiga

Uraian	Jumlah	Penjelasan
Tagihan CC Pemakaian BBM Bln Des 2020	20.676.269	Tagihan kepada Pihak Bank BRI untuk pembayaran Kartu Kredit Bln Des 2020
Total	20.676.269	

Ekuitas

Rp908.919.155,00

C.11 Ekuitas

Ekuitas per 31 Desember 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp908.919.155,00 dan Rp367.444.214,00. Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

Pendapatan PNB

Rp 0

D.PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

D.1 Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebesar Rp 0 dan Rp 0. Pendapatan tersebut terdiri dari:

Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak TA 2020 dan 2019

URAIAN	TH 2020	TH 2019	NAIK (TURUN) %
Pendapatan Jasa	0	0	0
Pendapatan Lain-lain	0	0	0
Jumlah	0	0	0

Tidak terdapat Pendapatan Jasa maupun Pendapatan lain-lain pada Laporan Operasional Tahun 2020 dan 2019.

*Beban
Pegawai
Rp4.982.415.
537,00*

D.2 Beban Pegawai

Jumlah Beban Pegawai pada Tahun 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp4.982.415.537,00 dan Rp5.016.246.620,00. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Terjadi penurunan Beban Pegawai sebesar 0,67 %.

Rincian Beban Pegawai TA 2020 dan 2019

URAIAN	TH 2020	TH 2019	NAIK (TURUN) %
Beban Gaji	929.007.805	845.196.213	9,92
Beban Tunjangan-tunjangan	383.504.800	319.257.742	20,12
Beban Honorarium dan Vakasi	2.295.777.935	2.486.600.000	-7,67
Beban Pegawai(Tunj.Khusus/kegiatan)	1.374.124.997	1.365.192.665	0,65
Jumlah	4.982.415.537	5.016.246.620	-0,67%

*Beban
Persediaan
Rp262.601.5
06,00*

D.3 Beban Persediaan

Jumlah Beban Persediaan pada Tahun 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp262.601.506,00 dan Rp409.649.384,00. Beban Persediaan merupakan beban

untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Rincian Beban Persediaan untuk Tahun 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Persediaan TA 2020 dan 2019

URAIAN	TH 2020	TH 2019	NAIK (TURUN) %
Beban Persediaan Konsumsi	232.680.600	591.221.227	-60,64
Beban Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga	733.900	0	0
Beban Persediaan Lainnya	-	0	0
Jumlah	233.414.500	591.221.227	-60,52

*Beban
Barang dan
Jasa
Rp10.654.04
9.256,00*

D.4 Beban Barang dan Jasa

Jumlah Beban Barang dan Jasa Tahun 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp10.654.049.256,00 dan Rp10.856.526.157,00. Beban Barang dan Jasa terdiri dari beban barang dan jasa berupa konsumsi atas barang dan/atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas serta beban lain-lain berupa beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Rincian Beban Barang dan Jasa untuk Tahun 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Barang dan Jasa TA 2020 dan 2019

URAIAN JENIS BEBAN	TH 2020	TH 2019	NAIK (TURUN) %
Beban Keperluan Kantor	3.551.256.569	3.317.064.716	7,06
Beban Jasa Pos dan Giro	9.480.080	7.534.248	25,83
Beban Honor	651.790.000	601.994.000	8,27
Beban Barang Operasional - Penanganan COVID - 19	205.953.694		
Beban Barang	123.724.315	298.126.350	(58,50)
Beban Bahan	359.379.350	777.831.348	(53,80)
Beban Langganan dan daya	151.171.878	86.660.499	74,44
Beban Sewa	5.165.994.870	4.935.671.706	4,67
Beban Jasa Konsultan	0	142.313.200	-
Beban Jasa Profesi	342.150.000	465.300.000	(26,47)
Beban Jasa Lainnya	93.148.500	224.030.090	-
Beban Aset Ekstrakomtabel	0	0	-
Jumlah	10.654.049.256	10.856.526.157	(1,87)

Beban Pemeliharaan Rp266.325.116,00

D.5 Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan Tahun 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp267.189.716,00 dan Rp266.325.116,00. Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Rincian beban pemeliharaan untuk Tahun 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Pemeliharaan TA 2020 dan 2019

URAIAN JENIS BEBAN	TH 2020	TH 2019	NAIK (TURUN) %
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	0	0	-
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	266.325.116	402.159.752	(33,78)
Beban Pemeliharaan Lainnya	864.600	0	-
Jumlah	267.189.716	402.159.752	33,56%

Beban Perjalanan Dinas Rp4.987.562.210,-

D.6 Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas Tahun 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp2.474.895.660,00 dan Rp4.987.562.210,00. Beban tersebut merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Rincian Beban

Perjalanan Dinas untuk Tahun 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Perjalanan Dinas TA 2020 dan 2019

URAIAN JENIS BEBAN	TH 2020	TH 2019	NAIK (TURUN) %
Beban Perjalanan Biasa	917.125.022	1.242.656.923	-26,20
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	196.602.000	314.275.000	-37,44
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	137.360.000	429.353.905	-68,01
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	1.223.808.638	2.150.621.084	-43,10
Beban Perjalanan Biasa Luar Negeri	0		#DIV/0!
Jumlah	2.474.895.660	4.136.906.912	-40,18%

*Beban
Penyusutan
dan
Amortisasi
Rp309.304.7
19,00*

D.7 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk Tahun 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp309.304.719,00 dan Rp330.013.961,00. Beban Penyusutan merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk tahun 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi

TA 2020 dan 2019

URAIAN BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI	TH 2020	TH 2019	NAIK (TURUN) %
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	297.429.719	274.882.711	8,20
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	-	-	#DIV/0!
Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	-	-	#DIV/0!
Beban Penyusutan Aset Tetap yg tidak digunakan	-	-	#DIV/0!
Jumlah Penyusutan	297.429.719	274.882.711	8,20
			#DIV/0!
Beban Amortisasi Software	11.875.000	55.131.250	(78,46)
Beban Penyusutan aset lain-lain	-	-	#DIV/0!
Jumlah Amortisasi	11.875.000	55.131.250	(78,46)
Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi	309.304.719	330.013.961	-6,28%

Surplus dari Kegiatan Non Operasional Rp6.122.698,00

D.8 Kegiatan Non Operasional

Pos Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya *tidak* rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus dari Kegiatan Non Operasional Tahun 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut;

Rincian Kegiatan Non Operasional TA 2020 dan 2019

URAIAN	TH 2020	TH 2019	NAIK (TURUN) %
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	0	3.000.000	-1,00
Beban Pelepasan Aset Non Lancar	-	-	#DIV/0!
Pendapatan dari kegiatan Non Operasional Lainnya	6.370.098	6.241.830	0,02
Beban dari kegiatan Non Operasional Lainnya	(247.400)	(626.729)	(0,61)
Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan *)			
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional	6.122.698	8.615.101	-28,93%

*) Pendapatan/Beban Penyesuaian Nilai Persediaan timbul karena kebijakan penilaian persediaan menggunakan metode Harga Perolehan Terakhir. Akun ini tidak akan muncul ketika penilaian persediaan menggunakan metode First In First Out (FIFO).

D.9 Pos Luar Biasa

Pos Luar Biasa terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak sering terjadi, tidak dapat diramalkan dan

*Pos Luar
Biasa Rp 0*

berada di luar kendali entitas. Rincian Pos Luar Biasa untuk Tahun 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

Rincian Pos Luar Biasa TA 2020 dan 2019

URAIAN	TH 2020	TH 2019	NAIK (TURUN) %
Pendapatan PNB	0	0	-
Beban Perjalanan Dinas	0	0	-
Beban Persediaan	0	0	-
Jumlah	0	0	-

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

*Ekuitas Awal
Rp367.444.214,
00*

E.1 Ekuitas Awal

Nilai ekuitas pada tanggal 1 Januari 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp367.444.214,00 dan Rp674.096.789,00.

*Defisit LO
Rp18.944.176.8
56,00*

E.2 Surplus (Defisit) LO

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 2019 Rp18.944.176.856,00 dan Rp21.917.082.688,00. Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

*Penyesuaian
Nilai Aset
Rp0*

E.3.1 Penyesuaian Nilai Aset

Nilai Penyesuaian Nilai Aset untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebesar Rp0

dan Rp0. Penyesuaian Nilai Aset merupakan hasil penyesuaian nilai persediaan akibat penerapan kebijakan harga perolehan terakhir.

*Koreksi Nilai
Persediaan
Rp0*

E.3.2 Koreksi Nilai Persediaan

Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam pencatatan persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. Koreksi tambah atas nilai persediaan untuk tahun 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Rincian Koreksi Nilai Persediaan untuk tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Rincian Koreksi Nilai Persediaan

Jenis Persediaan	Koreksi
Barang Konsumsi	-
Suku Cadang	-
Jumlah	-

*Selisih
Revaluasi
Aset Tetap
Rp0*

E.3.3 Selisih Revaluasi Aset Tetap

Selisih Revaluasi Aset Tetap merupakan selisih yang muncul pada saat dilakukan penilaian ulang aset tetap. Selisih Revaluasi Aset Tetap untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0.

*Koreksi Aset
Tetap Non
Revaluasi Rp0*

E.3.4 Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi

Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebesar Rp0 dan Rp0.

Rincian Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi Tahun 2020

Jenis Aset Tetap	Nilai Koreksi
Aset tetap non Revaluasi	-
Aset lainnya non Revaluasi	-
Jumlah	-

Koreksi Lain-Lain Rp0

E.3.5 Koreksi Lain-Lain

Koreksi Lain-Lain untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebesar Rp0,- dan Rp0,- . Rincian Koreksi lain-lain adalah sebagai berikut:

Rincian Koreksi Lain-Lain

Jenis Beban	Jumlah Koreksi
Koreksi Beban	-
Koreksi Pendapatan	-
Koreksi Piutang	-
Koreksi Kewajiban	-
Koreksi Hibah	-
Jumlah	-

Transaksi Antar Entitas Rp19.485.651.797,00

E.4 Transaksi Antar Entitas

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir 31 Desember 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp19.485.651.797,00 dan Rp21.610.430.093,-. Transaksi antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal KL, antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN.

Rincian Nilai Transaksi Antar Entitas

Transaksi Antar Entitas	Nilai
Diterima dari Entitas Lain	(7.390.506)
Ditagihkan ke Entitas Lain	19.493.042.303
Transfer Masuk	-
Transfer Keluar	-
Pengesahan Hibah Langsung	-
Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung	-
Jumlah	19.485.651.797

Rincian Transaksi Antar Entitas terdiri dari:

E.4.1 Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)

Diterima dari Entitas Lain/Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode hingga 31 Desember 2020, DDEL sebesar Rp7.390.506,00 sedangkan DKEL sebesar Rp19.493.042.303,00.

E.4.2 Transfer Masuk/Transfer Keluar

Transfer Masuk/Transfer Keluar merupakan perpindahan aset/kewajiban dari satu entitas ke entitas lain pada internal KL, antar KL dan antara KL dengan BA-BUN.

Transfer Masuk sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp 0 terdiri dari:

No	Jenis	Entitas Asal	Nilai
1	Peralatan dan Mesin		-
3	Persediaan		-
	Jumlah		-

Sedangkan Transfer Keluar sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp 0 .

E.4.3 Pengesahan Hibah Langsung dan Pengembalian Pengesahan Hibah Langsung

Pengesahan Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan hibah langsung KL dalam bentuk kas, barang maupun jasa sedangkan pencatatan pendapatan hibah dilakukan oleh BA-BUN. Pengesahan Hibah Langsung sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp 0,- dari yang diterima sepanjang tahun 2020.

Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan pengembalian hibah langsung entitas. Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 adalah Rp0.

Rincian pengesahan Hibah untuk tahun 2020 adalah sebagai berikut:

No	Pemberi Hibah	Bentuk Hibah	Nilai Hibah
1			Rp -
2			Rp -
Total Pengesahan			Rp -
Pengesahan Pengembalian Hibah			Rp -
Jumlah			Rp -

**Ekuitas
Akhir
Rp908.919.
155,00**

E.5 Ekuitas Akhir

Nilai Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp908.919.155,00 dan Rp367.444.214,-.

F. PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA.

F.1 KEJADIAN-KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL NERACA

- Pada Bulan Januari 2021 utang kepada pihak ketiga terkait tagihan Kartu Kredit BBM Bulan Desember 2020 telah dilunasi
- Anggaran Tahun 2021 dilakukan pemotongan dan penghematan untuk di prioritaskan kepada vaksinasi COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional.

F.2 PENGUNGKAPAN LAIN-LAIN

- Pada tahun 2020 telah dipenuhinya jabatan eselon II dan Koordinator Bagian yang sebelumnya kosong
- Terjadi peralihan jabatan structural menjadi jabatan fungsional berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2019 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional, sehingga jabatan eselon IV dan eselon III dihilangkan beralih menjadi jabatan fungsional
- Terjadi Pandemi COVID-19 yang melanda dunia sehingga dilakukan re-focussing anggaran seluruh Kementerian / Lembaga di seluruh Indonesia. Pelaksanaan anggaran difokuskan terhadap penanganan pandemi dan pemulihan ekonomi nasional